

**PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, DAN PENGETAHUAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH**

(Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : PUTRI NOVITA MUNTHE
NPM : 1505170670
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **PUTRI NOVITA MUNTHE**
N P M : **1505170670**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. (Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Labuhan Batu)**
Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA.,SE.,M.Si

Penguji II

RIVA UBAR HARAHAP.,SE.,M.Si,Ak,CA,CPA

Pembimbing

MUHAMMAD FAHMI.,SE.,M.Si,Ak

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : PUTRI NOVITA MUNTHE
N.P.M : 1505170670
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuha Batu)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si, Ak

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

ABSTRAK

PUTRI NOVITA MUNTHE. NPM. 1505170670. Pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhan Batu). Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Responden dalam penelitian ini merupakan Staf Auditor Inspektorat. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 32 responden dari 35 kuesioner yang disebar. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner dengan menggunakan uji kualitas data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$), uji F, dan uji t. Hasil penelitian terbukti bahwa variabel *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Secara parsial, variabel *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Kata Kunci: *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Awaluddin Munthe, S.H dan Ibunda tercinta Hj. Mesra Pohan, S.E sebagai sumber semangat motivasi kehidupan yang telah memberikan dukungan moril dan material serta do'a kepada penulis.
2. Adik-adik kandung tersayang Gilang Rizki Utama Munthe dan Fitri Azzahra Munthe yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
3. Seluruh anggota keluarga **BGP GROUP** yang selalu senantiasa mendoakan penulis.
4. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak H. Januri, S.E, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Fitriani saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Muhammad Fahmi, S.E, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Bapak Inspektur Inspektorat dan seluruh staff Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu saya ucapkan terima kasih atas izin dan dukungan untuk meneliti di Instansi Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu serta bantuan yang diberikan hingga memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman seperjuangan saya yang amat saya sayangi Ulfa Rizki Hayati (atik) dan Rizki Fitria Chairani (kiki) yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
14. Kakak saya Ifroh Wulandari, Putri Permata Hati tempat curahan hati senasib sepenanggungan setempat tidur dan teman-teman kos Alfalah 4

Nomor 11 yang sentiasa memberi semangat dukungan moril serta doa kepada penulis.

15. Teman-teman Kelas VII-I Pagi dan untuk kelas konsentrasi audit siang Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung dan memotivasi penulis selama menyusun skripsi ini

16. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2019

Penulis

PUTRI NOVITA MUNTHER

NPM : 1505170670

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.....	11
a. Teori Peran	11
b. Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.....	12
2. Personal Background	17
3. Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan.....	23
4. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Konseptual dan Hipotesis.....	31
i. Kerangka Konseptual	31
ii. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Defenisi Operasional Variabel	37
1. Variabel Terikat (<i>Variabel Dependen</i>).....	37
2. Variabel Bebas (<i>Variabel Independen</i>).....	38
i. <i>Personal Background</i>	38
ii. Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	42
1. Populasi	42
2. Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43

F. Teknik Analisis Data.....	44
1. Uji Kualitas Data	44
a. Uji Validitas Data.....	44
b. Uji Reliabilitas	45
2. Pengujian Asumsi Klasik.....	47
a. Uji Normalitas	47
b. Uji Multikolinearitas.....	48
c. Uji Heteroskedastitas	48
3. Pengujian Hipotesis	48
a. Koefisien Determinasi	49
b. Uji Statistik T.....	50
c. Uji Statistik F.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Deskripsi Data	51
a. Gambaran Objek Penelitian.....	51
b. Tingkat Pengembalian	51
c. Karakteristik Responden.....	52
d. Data Variabel.....	53
1) Variabel Dependen (Y)	54
2) Variabel Independen (X1).....	56
3) Variabel Independen (X2).....	59
2. Hasil Penelitian.....	63
a. Uji Kualitas Data	64
1) Uji Validitas	64
2) Uji Realiabilitas.....	66
b. Uji Asumsi Klasik	67
1) Uji Normalitas.....	67
2) Uji Multikolinearitas	68
3) Uji Heteroskedastitas	69
c. Pengujian Hipotesis	70
1) Koefisien Determinasi	70
2) Parsial (Uji T).....	71
3) Simultasn (Uji F).....	73
3. Pembahasan	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasa.....	78
C. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-I Opini BPK.....	5
Tabel I-II Permasalahan Ketidak Seuaian Penyajian Akun	7
Tabel II-I Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III-I Indikator Pengukuran Variabel	40
Tabel III-II Rincian Waktu penelitian.....	41
Tabel III-III Populasi dan Sampel.....	42
Tabel IV.1 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner	52
Tabel IV.2 Skala Pengukuran Likert.....	52
Tabel IV.3 Karakteristik Responden.....	53
Tabel IV.4 Jawaban Kuesioner Variabel Y.....	54
Tabel IV.5 Tabel Kuesioner Variabel X1	56
Tabel IV.6 Tabel Kuesioner Variabel X2	59
Tabel IV.7 Regresi Linear Berganda	63
Tabel IV.8 Uji Validitas <i>Personal Background</i>	65
Tabel IV.9 Uji Validitas Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	65
Tabel IV.10 Uji Validitas Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	65
Tabel IV.11 Uji Reliabilitas	66
Tabel IV.12 Uji Normalitas.....	68
Tabel IV.13 Uji Multikolinaeritas.....	68
Tabel IV.14 Koefesien determinasi.....	71
Tabel IV.15 Hasil Uji T	72
Tabel IV,16 Hasil Uji F.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.I Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	27
Gambar II.II Kerangka Konseptual	33
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	67
Gambar IV.2 Hasil Heterokedastitas.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Kuesioner Peneitian.....	1
2. Data Induk Penelitian	2
3. Pengujian Validitas.....	3
4. Pengujian Reliabilitas.....	4
5. Uji Multikolinearitas	5
6. Pengujian Hipotesis	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi mejadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Udang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desntralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Implikasi dari desentralisasi adalah perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah mempunyai wewenang untuk mengatur anggaran keuangan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan

daerahnya dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Otonomi daerah ada sedikit perubahan, sebelumnya pemerintahan daerah diberi kewenangan penuh oleh pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan diluar menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan di dalam Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian tentang otonomi daerah sedikit ada perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pusat. Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari wilayah administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya

manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winarna dan Murni (2007). Inspektorat Kabupaten / Kota, wajib melakukan tugas pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 24 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah. Inspektorat Kabupaten/Kota mengemban tugas, pokok dan fungsinya, dalam pemeriksaan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hasil dari pemeriksaan rutin berupa laporan hasil pemeriksaan yang akan diserahkan kepada kepala daerah.

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan suatu penguatan pada sisi pengawasan. Pemerintah kota dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh auditor inspektorat pemerintah daerah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka jelas peranan auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari pengawasan auditor inspektorat, yaitu masih rendahnya peranan inspektorat daerah dalam keseluruhan proses atau siklus pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Permasalahan tersebut dapat dikaji berdasarkan dua aspek yaitu aspek sistem dan aspek individu. Dari aspek sistem, inspektorat daerah kurang independen dalam melaksanakan tugasnya, mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan keuangan daerah secara keseluruhan, dimana dia bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah. Jika ada kecurangan yang dilakukan kepala daerah melalui kepala SKPD, maka auditor inspektorat tidak dapat berbuat banyak dalam melaporkan hasil temuannya. Dari segi individu, auditor inspektorat daerah memiliki kelemahan, yaitu wawasan

dan pemahaman auditor inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah relatif rendah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut tentu dilakukan sesuai standar dan kriteria yang berlaku hingga akhirnya menghasilkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ada empat opini yang diberikan pemeriksa, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP), dan Opini Tidak Wajar (TW).

Dari hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, hasil pemeriksaan atas seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 (542 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 411 (76%) LKPD, opini WDP atas 113 (21%) LKPD, opini TMP atas 18 (3%) LKPD. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016, kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Pada LKPD Tahun 2016, sebanyak 375 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%), sedangkan pada LKPD Tahun 2017 sebanyak 411 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (76%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terkendali kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP sebanyak 7 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD. Hasil pemeriksaan BPK atas 533 LKPD menunjukkan terdapat 6.222 kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Jika pelaksanaan audit internal dilakukan secara benar, maka tingkat kecurangan dan kesalahan dapat dideteksi lebih awal. Kelemahan tersebut antara lain dalam pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah dan kelemahan dalam proses penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan pemerintah daerah.

Banyak juga yang berpandangan bahwa auditor inspektorat hanya memahami masalah audit dan pengendalian, sedangkan bagaimana aktivitas operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk berbagai kendala, permasalahan, kerentanan suatu kegiatan, atau resiko serta potensinya dilingkungan daerah dianggap bukan sebagai wilayah kompetensi auditor. Dengan demikian auditor dianggap tidak ahli dan tidak tau menahu soal bagaimana aktivitas operasional atau penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan. Contohnya dalam pengadaan barang atau jasa, auditor inspektorat dianggap hanya memahami masalah pengendalian dan auditnya saja.

Tabel I.II Permasalahan Ketidak Sesuaian Penyajian Akun dengan SAP Yang Dijumpai dalam LKPD

No	Tahun	
	2016	2017
1.	Piutang <ul style="list-style-type: none"> • Piutang PBB, P2 belum diverifikasi dan divalidasi. 	Persediaan <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan persediaan tidak didukung dengan dokumen dan administrasi yang memadai.

2.	<p>Aset Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan antara nilai akumulasi penyusutan dengan daftar penyusutan aset tetap dan penyusutan atas aset tetap belum sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan, seperti kebijakan umur ekonomis aset tetap. 	<p>Aset lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset lainnya tidak diamortisasi dan disusutkan karena pemda belum memiliki kebijakan akuntansi antara lain terkait dengan masa manfaat, metode amortisasi aset tak berwujud dan penyusutan aset lainnya.
----	--	--

Sumber: BPK RI

Penelitian terdahulu terkait fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Hasil Penelitian Sitorus (2009) menunjukkan bahwa pada tahun 2006 di Provinsi Sumatera Utara terdapat 14 Kabupaten/kota yang mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK juga menemukan adanya kelemahan dan ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika pelaksanaan audit internal dilakukan secara benar, maka tingkat kecurangan dan kesalahan dapat dideteksi lebih awal. Penelitian Sitorus sejalan dengan penelitian, beberapa peneliti juga menyimpulkan penelitian tentang peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sepanjang pengetahuan penulis, Sitorus (2009) pengujian secara individual (parsial) *Personal Background* tidak mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Langkat dan Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Langkat. Sedangkan dari hasil pengujian secara simultan, diketahui bahwa variabel *Personal Background*, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kota Langkat. Dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul membahasnya dalam skripsi yang diberi judul : **“Pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal diatas, fenomena masalah pada penelitian ini adalah :

1. Terdapat keterangan dari pemeriksanaan BPK atas 533 LKPD menunjukkan terdapat 6.222 kelimahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.
2. Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2014 mendapatkan opini WTP (Wajara Tanpa Pengecualian) namun di tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan opini menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
3. Penyimpangan penggunaan anggaran terkait pencairan proyek RSUD Rantau Prapat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh *personal background* terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?
2. Apakah pengaruh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?
3. Apakah pengaruh *personal background* dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh *personal background* dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu baik secara simultan maupun parsial.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris terdapat pengaruh *personal background* dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Labuhan Batu.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, khususnya pada auditor inspektorat dapat mejadi masukan atau referensi untuk meningkatkan kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk wahana pengetahuan dan sumber informasi sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan ataupun yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan judul skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

a. Teori Peran (*The Role Theory*)

Teori peran adalah (*The role Theory*) adalah perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran merupakan bagian dari teori psikologis sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (Amalia, 2013). Teori ini beranggapan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Perilaku individu akan mempengaruhi peran individu tersebut dalam suatu organisasi atau kelompok. Setiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka bertindak dalam situasi khusus. Sejumlah orang mempunyai peran dan identitas, bergantung pada situasi dimana mereka menemukan diri mereka (Ikhsan dan Ishak, 2008 dalam Dewi, 2011) . oleh karena itu, setiap orang harus memahami peran masing-masing dalam suatu organisasi.

Kaitannya dengan peran seorang auditor Inspektorat adalah seorang auditor Inspektorat harus berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah di amanahkan. Auditor Inspektorat dituntut untuk menjalankan peranya dengan baik dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Peran auditor Inspektorat khususnya dalam pengawasan keuangan daerah APBD ditunjukkan untuk memastikan pelaksanaan keuangan daerah APBD sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang efektif dari auditor Inspektorat dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Sehingga peran auditor Inspektorat dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah sangatlah penting. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang secara maksimal diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan mendorong terwujudnya *good governance*.

b. Peran Auditor dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hubungan organisasi auditan dengan auditor, dikenal 2 (dua) kelompok auditor, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal sering juga disebut sebagai auditor independen karena tidak memiliki hubungan organisasi dengan pihak yang diaudit.

Dalam lingkup pemerintah daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Berdasarkan Pasal 1 PP 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang

luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya BPK dapat menugaskan pihak lain seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kewenangan BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, auditor internal pemerintah daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat. Hingga sekarang ini belum seluruh pemerintah daerah menamai organisasi auditor internalnya sebagai inspektorat. Beberapa pemerintah daerah masih menamakan organisasi auditor internalnya sebagai Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Inspektorat dan Bawasda memiliki arti dan makna yang sama sebagai auditor internal pemerintah daerah. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dinyatakan bahwa orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah disebut Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP). Proses audit internal menurut Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Penyusunan rencana pengawasan, Rencana Pengawasan, Pelaksanaan pengawasan, Hasil pengawasan, Tindak lanjut hasil pengawasan, Pemantauan dan pemutahiran. Auditor inspektorat harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam proses pelaksanaan audit internal jika tidak memiliki pengetahuan tersebut, maka independensinya diragukan baik independesni dalam kenyataan, independensi dalam penampilan dan independensi dalam kompetensi. Ketidaktahuan audiitor dalam proses pelaksanaan audit internal akan melemahkan perannya dalam pengawasan keuangan daerah.

Bagi kepala daerah, hasil pemeriksaan inspektorat merupakan informasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerah (SKPD dan SKPKD). Selanjutnya, kepala daerah akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat sebagai upaya untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan menyempurnakan pengelolaan APBD pada organisasi perangkat daerahnya.

Di beberapa pemerintah daerah independensi auditor inspektorat selalu diragukan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah mereka bukan orang sejak awal disiapkan untuk

bertugas di inspektorat secara pamanen. Kadang kalanya hanya ditempatkan untuk sementara waktu untuk promosi jabatan oleh kepala daerah.

Auditor inspektorat tidak mendapatkan pelatihan yang memadai terutama *skills* dan wawasan yang terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Tak jarang ada auditor inspektorat yang tidak memahami APBD dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan pemerintah daerah pengetahuan auditor tentang proses audit internal yang cukup baik sangat mendukung peran mereka dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal. Jika mereka memahami proses audit dengan baik dan benar, mereka dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan sementara, kebanyakan dari auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan tidak berdasarkan proses audit yang semestinya. Menurut kepala daerah, hasil pemeriksaan inspektorat merupakan informasi atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerahnya (SKPD dan SKPKD). Selanjutnya, kepala daerah akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat sebagai upaya untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan menyempurnakan pengelolaan APBD pada organisasi perangkat daerahnya.

Dengan tinjauan manajemen, inspektorat menjalankan fungsi pengawasan kepala daerah. Dengan demikian baik atau buruknya hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sesungguhnya

mencerminkan kualitas kepala daerah menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya.

Mekanisme pengelolaan APBD, sesungguhnya inspektorat merupakan komponen penting dari sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dimiliki kepala daerah. Kepala daerah seyogyanya mengetahui dengan baik bagaimana masing-masing organisasi perangkat daerah melaksanakan tanggungjawab pengelolaan APBD-nya. Idealnya, inspektorat melakukan pemeriksaan dan penilaian tersebut sebelum BPK sebagai auditor eksternal datang melakukan audit. Auditan SKPD dan SKPKD, penilaian yang dilakukan inspektorat setidaknya menjadi masukan yang berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pengelolaan APBD nya. Inspektorat sesungguhnya merupakan konsultan dan mitra auditan yang penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Menurut Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan BPK Perwakilan, laporan inspektorat yang ditembuskan padanya mencerminkan berjalan tidaknya fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawab kepala daerah. Inspektorat dapat saja menyembunyikan fakta yang tidak benar dalam laporan yang disampaikan. Tetapi bila kemudian BPK menemukan fakta yang tidak benar tersebut dan mengungkapkan hal dimaksud dalam laporan hasil auditnya, kepala daerah sebagai penanggungjawab pemerintahan daerah tentu akan dihadapkan pada posisi yang sulit. Kepala daerah yang bersangkutan dapat saja

dianggap tidak akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang memberi masukan kepada manajemen tentang hal yang sesungguhnya terjadi dalam fungsi pelaksanaan. Hasil pengawasan akan menjadi bahan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas perencanaan dan pelaksanaan. Jika fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka sudah dapat dipastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan tidak akan baik.

Dalam penelitian ini Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah tersebut memiliki beberapa indikator antara lain : (Syahrudin & Werry, 2002:23).

a. Memantau Implementasi

Memantau implementasi adalah bagaimana auditor Inspektorat memantau penerepan penerapan yang yang telah dilakukan oleh SKPD di Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

b. Mengadakan Evaluasi Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Mengadakan evaluasi terhadap APBD adalah bagaimana auditor mengawasi Evaluasi APBD seperti laporan LKPD triwulan/bulan yang dibuat oleh SKPD.

2. Personal Background

Personal Background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winanrna dan Murni, 2007).

Menurut Wiley (2002:3) mendefinisikan *personal background* adalah :

“ Bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.”

Menurut Winanrna dan Murni (2007) mendefinikan *personal background* sebagai berikut :

”*Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.”

Dengan keterbatasan aspek kelembagaan dan manajerial, maupun dari aspek standar, pedoman dan sumber daya yang ada, Inspektorat Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dapat membantu kepala daerah dalam menetapkan fungsi manajemen. Hal ini didukung dengan pernyataan Elim (2006:7) bahwa peran auditor adalah terlibat dalam pengelolaan resiko membantu manajemen, berperan sebagai pihak yang melaksanakan *control self assessment* atas pengendalian manajemen, melakukan audit berbasis resiko.

Inspektorat Pemerintah Kabupaten / Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatida serta secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah kasus

pengaduan bidang perekonomian kersa, pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang Aset, pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus bidang pendapatan dan belanja dan pelaksanaan urusan Pemerintahan dan kasus bidang Pemerintahan umum dan kepegawaian. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah Kabupaten/kota. Hasil dari pemeriksaan rutin berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang-bidang kerja.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari berbagai bidang. Untuk itu keaneka ragaman latar belakang pendidikan sangat berguna dalam proses pemeriksaan oleh auditor Inspektorat Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010:4), ditemukan dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Disinilah peran pihak ketiga yang independen yaitu auditor yang bertugas memeriksa kebenaran dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk diberikan kepada pengguna laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk diberikan kepada pengguna laporan keuangan, sehingga informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan dan

reliabel untuk digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal pada Pemerintah Daerah, terutama dalam melakukan revidu atas laporan keuangan, inspektorat harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan pendidikan, mempunyai pengalaman di bidang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan adanya perubahan metode dari *single entry* ke *double entry*. Auditor inspektorat harus memiliki kemampuan yang cukup dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penatausahaan dan pelaporan. Hampir 75% hasil laporan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa penatausahaan keuangan daerah masih terdapat kecurangan dan kesalahan. Kesalahan itu disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang peraturan yang ada. Hal ini biasanya berkaitan dengan penggunaan dokumen penatausahaan. Dalam hal pelaporan, auditor inspektorat harus memahami karakteristik dari transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan *personal background* akan memiliki perbedaan dalam karakteristik dan tingkah laku, tingkat kematangan berpikir dan dalam pengambilan keputusan. Sastoatmodjo (1995:3) menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dalam tingkat kematangan

berpikir dan dalam pengambilan keputusan. La Palombara (1974:87) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bersikap, berperilaku dan berperan dalam tugasnya diantaranya latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, pengalaman dan usia.

Dalam penelitian ini *personal background* m tersebut memiliki beberapa indikator antara lain (menurut La Palombara (1974:87) :

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah pendidikan formal dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan staf inspektorat sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang pola fikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Semakin tinggi latar belakang pendidikan dari anggota dewan artinya semakin baik juga kinerja staf inspektorat dalam mengawasi keungan daerah.

b. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan berkaitan dengan jurusan yang diambil pada saat duduk dibangku perkuliahan. Latar belakang pendidikan dari staf inspektorat dapat membantu dalam pekerjaannya sebagai pengawas keungan daerah.

c. Pengalaman Kerja di Pemerintahan

Lama kerja di pemerintahan merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh seorang individu yang bekerja dalam lingkup kerja di pemerintahan juga merupakan proses belajar seorang yang akan

memberikan pengalaman dalam suatu organisasi atau kelompok, dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan akan membantu dalam pelaksanaan tugasnya sebagai staf inspektorat.

d. Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Pelatihan tentang keuangan daerah berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota dewan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Pelatihan juga merupakan proses belajar yang dapat meningkatkan intelektual dan pemahaman staf inspektorat tentang keuangan daerah. Semakin sering mengikuti pelatihan tentang keuangan daerah maka akan menambah pengetahuan staf inspektorat dan akan mengoptimalkan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah.

3. Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur. Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Nisa dan Irmadariyani (2016) menyatakan bahwa pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Salim (2006:35) dalam Handoyono dan Trisnowati (2011) menyatakan bahwa pengetahuan

sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang dipelajari.

Menurut Conner dan Prahalad (1996:135) mengenai pengertian tentang pengetahuan adalah sebagai berikut :

“Menyebut bahwa, *knowledge is an important source for an organization. Knowledge has an important roles for organization to runs optimally.* Artinya bahwa Inspektorat auditor harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.”

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Auditor Inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Menurut Mardiasmo (2002:105) perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumbuh pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat

- pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
 3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
 4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
 5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
 6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitahunan.
 7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
 8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini, rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
 9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Berdasarkan Pasal I PP 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penata usahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggung jawaban dan pengawasan.

Review yang dilakukan aparat Inspektorat adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Semua proses pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dipahami oleh auditor Inspektorat. Hal ini berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran dan juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

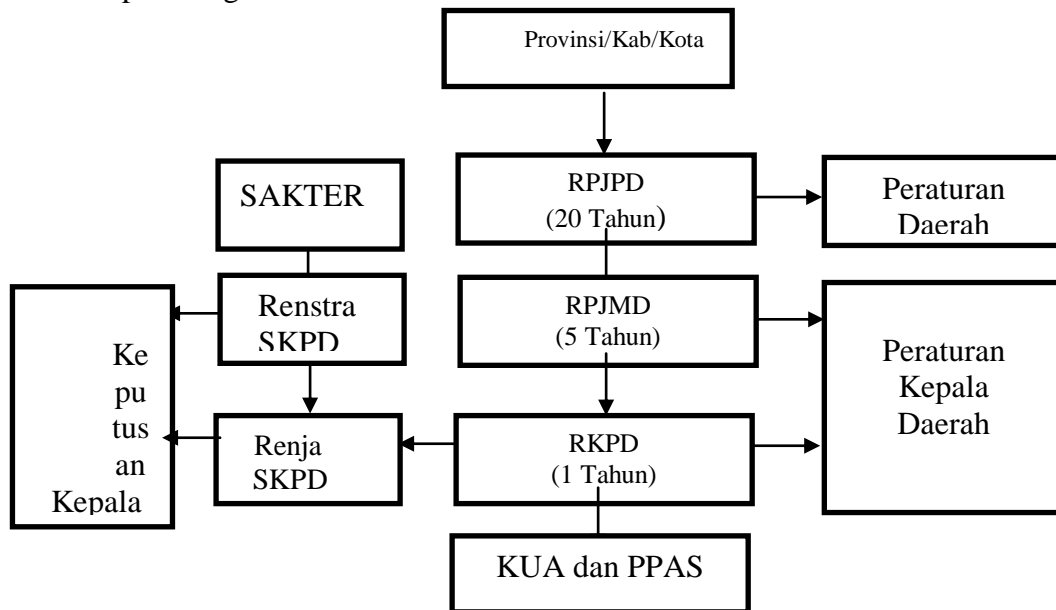
Edward (1992:3) menyatakan manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan. Hal ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah secara jelas dapat mendefinisikan atau merumuskan tujuan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan tentang alokasi sumber daya daerah untuk kepentingan publik dapat tercapai. APBD memiliki potensi penyimpangan atau penyalahgunaan yang cukup tinggi, karena berkaitan dengan pengelolaan atas daerah dalam bentuk keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan UU No. 32 tahun 2004 tentang PERDA dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dokumen Perencanaan yang baru dibuat adalah :

- a. Rencana pembangunan jangka panjang
- b. Rencana pembangunan jangka menengah
- c. Rencana pembangunan tahunan
- d. Rencana strategis SKPD
- e. Rencana Kerja SKPD

Dokumen a sampai dengan c adalah dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sedangkan dokumen d dan e adalah dokumen yang dibuat oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Masing-masing

dokumen perencanaan di atas terkait satu dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.



Gamabar II.I

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Setelah peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan, maka pejabat pengelola keuangan daerah membuat surat pemberitahuan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) dan anggaran kas. Setelah disetujui DPA, maka langkah selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dari anggaran tersebut. Penatausahaan anggaran belanja dimulai dengan penyusunan dokumen surat perintah pembayaran sampai keluar SKPD serta pertanggungjawaban dari belanja tersebut. Penatausahaan anggaran belanja di mulai dengan penyusunan dokumen surat perintah pembayaran sampai keluar SP2D serta pertanggungjawaban dari belanja tersebut. Berdasarkan dokumen penatausahaan tersebut, maka dilakukan pencatatan dalam BKU dan dalam jurnal sampai selesai laporan keuangan.

Dalam penelitian ini Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut memiliki beberapa indikator antara lain :
(Menurut Widayat (2010:76)

a. Mengikuti Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Pelatihan tentang keuangan daerah berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh staf inspektorat yang berhubungan dengan keuangan daerah. Pelatihan juga merupakan proses belajar yang dapat meningkatkan intelektual dan pemahaman staf inspektorat tentang keuangan daerah. Semakin sering mengikuti pelatihan tentang keuangan daerah maka akan menambah pengetahuan staf inspektorat dan akan mengoptimalkan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah.

b. Mengetahui Penyusunan Dokumen-dokumen Penting

Yang dimaksud disini adalah para staff inspektorat mengerti akan rincian rincian APBD, menyusun RKA, DPA dan KUA yang telah dibuat agar mudah dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan ide penelitian yang dilakukan oleh Winanrna & Murni (2007:14). Mereka meneliti Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Sitorus (2009) dalam penelitiannya Pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Langkat. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Langkat.

Dita Amanda Saragih (2016), dalam penelitiannya Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengalaman Auditor, Akuntabilitas, dan Independensi Terhadap Kualitas Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif antara *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengalaman Auditor, Akuntabilitas dan Intensitas terhadap Kualitas Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Dheo Rimbano (2016:10), dalam penelitiannya Pengaruh kompetensi keuangan auditor (*personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal) terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Musi Rawas. Hasil penelitian ini

menunjukkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan keuangan daerah dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan personal background secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Winarna & Murni (2007)	Pengaruh <i>Personal Background, political background</i> dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.	Menyebutkan bahwa <i>personal background, political background</i> dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
Sitorus (2009)	Pengaruh <i>personal background</i> , dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, studi kasus pada inspektorat pemerintah langkat.	Menyebutkan bahwa <i>Personal Background</i> tidak berpengaruh terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada daerah Kabupaten Langkat dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten Langkat.
Saragih (2016)	Pengaruh <i>personal background</i> , pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengalaman auditor akuntabilitas independensi terhadap kualitas kinerja auditor inspektorat pemerintah provinsi sumatera utara.	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan secara simultan terdapat pengaruh positif antara <i>personal background</i> , pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, pengalaman auditor, akuntabilitas dan integritas terhadap kualitas kinerja

		auditor inspektorat provinsi sumatera utara.
Rimbano (2016)	Pengaruh kompetensi keuangan auditor <i>personal background</i> , pengetahuan tentang keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan.	Pengelolaan keuangan daerah dana pengetahuan tentang proses pelaksanaan keuangan daerah dan pengetahuan audit internal mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan <i>personal background</i> secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah.

B. Kerangka Konseptual

Erlina (2011:33) menyatakan bahwa “kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu”. Kerangka teoritis akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas, dan variabel terikat. Begitu juga jika ada variabel yang menyertainya, maka peran variabel tersebut harus dijalankan. Kerangka teoriti perlu dikeukakan apabila penelitian menghubungkan dua penelitian atau lebih.

1. Pengaruh *Personal Background* terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Personal backgroud adalah latar belakang seseorang yang melekat pada dirinya seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang dan sebagainya. Sumber daya manusia merupakan pilar peyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha

mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian.

Pada penelitian Sitorus (2009) mengatakan bahwa *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah tetapi pada penelitian Winarna & Murni (2007) menyatakan bahwa *personal background* mempengaruhi secara signifikan terhadap peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Pengaruh Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Auditor inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

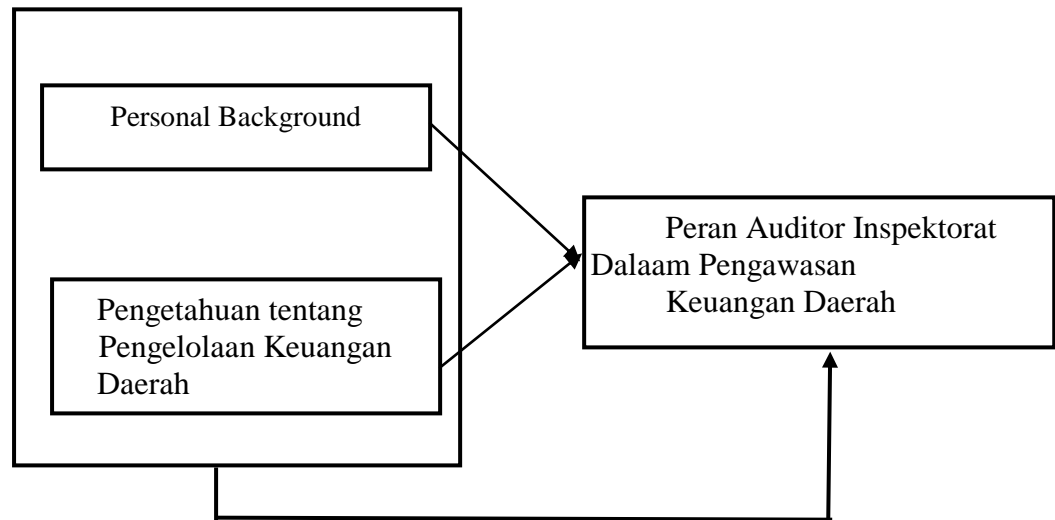
Pada penelitian saragih (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas kinerja auditor inspektorat provinsi Sumatera Utara dan pada penelitian sitorus (2009) menyatakan hal yang sama bahwa pengetahuan pengelolaan keuangan terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif.

3. Pengaruh *Personal Backgroud* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Personal background dan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh penting dalam pengawasan keuangan daerah dikarenakan latar belakang pendidikan dan sebara tinggi pengetahuan auditor inspektorat akan mempengaruhi kinerjanya dalam mengawasi keuangan daerah.

Pada penelitian Rimbano (2016) pengelolaan keuangan daerah dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan keuangan daerah dan pengetahuan audit internal mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan *personal background* secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah, dan pada penelitian winanrna & murni (2007) Menyebutkan bahwa *personal background, political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar II.2
Kerangka Konseptual
Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Tentang
Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat
Dalam Pegawasan Keuangan Daerah

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan proporsi yang dirumuskan dengan maksud di uji secara empiris (Erlina, 2007:41).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh *Personal Bcakground* terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

H_2 : Terdapat pengaruh Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Dearah terhadap Peran Auditor dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

H₃ : Terdapat pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peran Auditor dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat (asosiatif kausal) yaitu ikatan variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y (Erlina, 2007:66). Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan sebab-akibat dengan cara mengamati akibat yang ada dan menelusuri faktor-faktor penyebabnya.

B. Defenisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan oleh penulis meliputi variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

1. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Idriantoro dan Supomo2002:63).

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Y). Menurut

Kuncoro (2006:9), variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan.

Indikator dalam Peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah :

1) Memantau Implementasi

Memantau implementasi adalah bagaimana staff inspektorat memantau penerapan-penerapan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten labuhan batu.

2) Mengadakan Evaluasi Terhadap APBD

Mengadakan evaluasi terhadap APBD adalah bagaimana auditor mengawasi evaluasi APBD seperti laporan LKPD triwulan/bulan yang dibuat oleh SKPD.

2. Variabel Bebas (*Variabel Independen*)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Personal Background* (X1) dan Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2).

i. *Personal Background* (X1)

Personal background staf Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu diukur melalui melalui strata pendidikan yang dimiliki oleh staf Inspektorat. Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval

Dalam penelitian ini indikator *Personal Background* dengan dua aspek yaitu :

1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan staf inspektorat sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas

2. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan berkaitan dengan jurusan yang diambil pada saat duduk dibangku perkuliahan. Latar belakang pendidikan dari staf inspektorat dapat membantu dalam pekerjaannya sebagai pengawas keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja di Pemerintahan

Lama kerja di pemerintahan merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh seorang individu yang bekerja dalam lingkup kerja di pemerintahan juga merupakan proses belajar seorang akan memberikan pengalaman di suatu organisasi.

ii. Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini indikator Pengetahuan tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam dua aspek :

1. Mengikuti Pelatihan tentang Keuangan Daerah

Pelatihan tentang keuangan daerah berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh staf inspektorat yang berhubungan dengan keuangan daerah.

2. Mengetahui Penyusunan Dokumen-dokumen Penting

Para staff inspektorat mengerti akan mengenai rincian-rincian APBD, menyusun RKA, DPA dan KUA agar mudah dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Skala pengukuran penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen yang diukur dengan menggunakan Skala Interval. “Skala Interval adalah skala ordinal yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak yang dicipta sama antara masing-masing angka. Semakin tinggi nomor jumlah, maka semakin besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Skala nilai yaitu sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1, tidak setuju (TS) dengan nilai 2, netral (N) dengan nilai 3, setuju (S) dengan nilai 4 dan sangat setuju (SS) dengan nilai 5.

Tabel III.1 Indikator Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Peran auditor inspektorat dalam pengawasan	Peran inspektorat adalah sejalan dengan Peran Pengawasan Intern untuk mendorong aktivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola	1. Memantau Implementasi 2. Mengadakan Evaluasi terhadap Anggaran	Likert

keuangan daerah (Y)	organisasi	n Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Syahrudin & Werry)	
<i>Personal Background</i> (X1)	<i>Personal Background</i> adalah latar belakang diri dari auditor	1. Tingkat pendidikan. 2. Latar belakang pendidikan. 3. Pengalaman kerja di pemerintahan. 4. Pelatihan tentang keuangan daerah. (La Palombara)	Likert
Pengertian tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran serta pertanggung jawaban dan pengawasan	1. Mengikuti pelatihan tentang keuangan daerah 2. Mengetahui penyusunan dokumen-dokumen penting (Mardias)	Likert

		mo)	
--	--	-----	--

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhan Batu di Jalan Sisingamangaraja No 062 Telp. (0624) 325840 FAX. (0624) 325840 Kota Rantau Prapat.

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan desember 2018 sampai dengan selesai.

Tabel III.2 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	N				D				J				F				M			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■																		
Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
Bimbingan Prposal									■	■	■	■								

Semin ar Propo sal																				
Bimbi ngan dan Penyu sunan Skripsi																				
Sidan g Meja Hijau																				

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono (2005:72). Populasi dalam penelitian ini adalah staf Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu yang berjumlah , dengan struktur sebagai berikut :

Tabel III.3
Populasi dan Sampel

No.	Jabatan / Fungsional	Jumlah Pimpinan	Staf	Jumlah
1.	Inspektur Inspektorat	1	-	1
2	Sekret	1	-	1

.	aris Inspek torat			
3	Inspek tur Pemba ntu Wilaya h (Irban)	-	1 0	10
4	Audito r Madya	-	1 0	10
5	Audito r Muda	-	1 0	10
6	Audito r Penyel ia	-	3	3
Total				35

Penelitian ini bersifat survei, sehingga staf Inspektorat

Kabupaten Lauhan Batu sejumlah 35 orang dijadikan sampel. Menurut Ghozali & ikhsan (2006:21) metode survei menggunakan pertanyaan lisan atau tulisan dan memerlukan adanya kontak atau hubungan anatara peneliti dengan subjek (responden). Data penelitian dapat berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik subjek penelitian secara individual ataupun secara berkelompok.

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Apabila populasi besar, sehingga peniliti tidak mungkn mempelajari semua yag ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi

itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Jika sampel kurang representatif, akan mengakibatkan nilai yang dihitung dari sampel tidak cukup tepat untuk menduga nilai populasi yang sesungguhnya (Sugiyono, 2007:16). Seluruh Populasi di jadikan sampel dalam penelitian ini, Maka jumlah Sampelnya adalah 35 responden dan sampel yang diteliti adalah Seluruh Staff Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu . Dan perhitungannya dengan menghitung kuesioner yang di kembalikan oleh responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang akan digunakan oleh penulis untuk mengelola data yang diperoleh agar dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat dibuktikan secara empiris. Meningat pengumpulan suatu data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner merupakan hal yang penting. Perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian terhadap data hasil kuesioner melalui uji validitas dan uji reliabilitas terhadap jawaban kuesioner yang akan digunakan sebagai data dalam penelitian. Data yang baik setidaknya harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

F. Teknik Analisis Data

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik (SPSS) dengan versi 22.0 yaitu metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis atau pengujian regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel. Variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier.

1. Uji Kualitas Data

Keabsahan (*validity*) suatu hasil penelitian sangatlah tergantung pada alat pengukur variabel yang akan diteliti. Alat ukur atau instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil yang akurat dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan. Jika alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak andal atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan valid. Penelitian ini diperlukan uji validitas dan uji realibilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Ghozali, 2012:52, dari jurnal Mulia dan Sri wahyuni). Validitas memiliki nama lain seperti sahih, tepat, benar. Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel

penelitian. Jika instrumen valid / benar maka hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar (Azuar Juliandi, Irfan dan Saprial Manurung, 2015:76).

Rumusnya sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Langkah-langkahnya pengujian validitas dengan korelasi adalah sebagai berikut :

- 1) Korelasikan skor-skor suatu nomor angket dengan skor total seluruh item.
- 2) Jika nilai korelasi (r) yang diperoleh adalah positif, kemungkinan butir yang diuji tersebut valid.
- 3) Namun walaupun positif, perlu pula nilai korelasi (r) yang dihitung tersebut dilihat signifikan tidaknya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai korelasi yakni r dihitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka butir instrumen adalah valid. Butir instrumen yang tidak valid (tidak benar / salah) tidak layak dijadikan sebagai item di dalam instrumen penelitian. Butir yang tidak valid dibuang dari instrumen angket.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk menguji suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dan kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2017:47, dari jurnal Mulia dan Sri wahyuni).

Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi.

a. Pengujian reliabilitas menggunakan *Split half*, dengan cara sebagai berikut :

- Belah instrumen mejadi 2 bagian (instrumen bernomor ganjil dan genap)
- Korelasikan skor-skor total ganjil, dengan skor-skor total genap, dengan statistik korela *product moment* (r).
- Masukkan nilai korelasi (r) yang diperoleh ke dalam rumus *Spearman Brown*.

$$r_i = \frac{2r}{1+r}$$

- Penarikan kesimpulannya, jika nilai koefesien reliabilitas (*Alpha cronch Brown*/r_i) > 0,6 maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik / reliabel

/ terpercaya (Nunnally dalam Ghozali dan Castellan, 2005).

2. Pengujian Asumsi Klasik

Oleh karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi asumsi yang diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria *BLUE* (*Best Linier Unbias Estimate*) seperti disarankan Gujarati (1999). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikan tertentu yaitu :

- Nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$, makka distribusi data adalah tidak normal

○ Nilai Signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

Selain melihat nilai signifikan dari uji *Kolmogorov / Smirnof*, untuk melihat apakah suatu data mempunyai distribusi normal dapat dilihat dari melihat grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika ada variabel bebas dapat memenuhi kriteria tersebut maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya (Ghozali, 2005).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID).

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. Analisis regresi bermanfaat terutama untuk tujuan peramalaman (*estimation*), yaitu bagaimana variabel independen digunakan untuk mengetimasi nilai variabel dependen. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, regresi juga digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan.

Untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh antara variabel tersebut dapat dilakukan dengan :

- a) Membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel dalam tingkat profitabilitas 5 % dan sisi (5 % *two-tailed*), apabila t hitung lebih besar dari t tabel atau t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis penelitian diterima (H_a diterima = nilai t hitung $> -t$ tabel atau t hitung $< -t$ tabel) dan begitu juga sebaliknya.
- b) Membandingkan tingkat signifikan (α), jika tingkat signifikan kurang dari 0,005 maka signifikan, jika lebih berarti tidak signifikan.

a. Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan

variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas. Nilai koefisien detreminasi berkisar anatar 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel – variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel variabel bebas (Ghozali, 2013:97).

b. Uji T (Parsial Test)

Uji *t-test* merupakan uji statistik parametik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Alasan penggunaan uji *t-test* karena diasumsikan data akan terdistribusikan normal, karena data yang digunakan secara keseluruhan pada tiap hipotesis dan akan dilihat apakah memiliki nilai rata- rata yang berbeda. (Ghozali, 2013:98) tujuan uji ini untuk mengetahui *t-test for equalit means* tiap pimpinan apakah sama atau berbeda, dengan ketentuan keputusan sebagai berikut:

- Jika probabilitas > 0.5 maka H_0 diterima,
- Jika probabilitas < 0.5 maka H_0 ditolak.

c. Uji F (Simultan Test)

Uji F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:98).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Wilayah Kota Rantau Prapat yang beralamat di Jl. SM Raja No.62 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, pada bulan awal desember sampai dengan selesai. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh *personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah studi kasus inspektorat kabupaten labuhan batu.

b. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penyebaran kuesioner dimulai dari 4-11 Februari 2019, penyebaran kuesioner diberikan dan diterima kembali oleh peneliti dengan waktu yang sudah ditentukan serta menyesuaikan dengan jadwal kerja staf inspektorat kabupaten labuhan batu. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar kepada responden dilingkungan inspektorat kabupaten labuhan batu adalah sebanyak 35 dan dilakukan dalam satu tahap. Dari 35 kuesioner yang diagikan yang kembali 32 kuesioner. Jadi kuesioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data sebanyak 32 kuesioner. Hasil kuesioner dan distribusinya dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel IV.1
Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim 36 Lembar	35	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	3	11,11%
Kuesioner yang kembali	32	88,99%

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan data dalam bentuk angket terdiri dari delapan pertanyaan untuk variabel *Personal Backgroud* (X1), tiga belas pertanyaan untuk variabel Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), dan sepuluh pertanyaan untuk variabel Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Angket yang disebarakan kepada 35 responden (jumlah staff inspektorat). Skala pengukuran likert dalam penelian pengisian kuesioner secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel IV.2
Skala Pengukuran Likert

Pertanyaan	Likert
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Tidak Tahu (TT)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2016)

Setiap responden yang menjawab angket maka bobot atau nilai mulai dari 5 sampai dengan 1 dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah adalah 1.

c. Karakteristik Responden

Dalam melakukan penelitian ini, peeliti mempunyai 32 responden yaitu seluruh staff Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu. Dari jawaban kuesioner yang diterima oleh peneliti, diperoleh data karakteristik responden

berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.3
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi	Persen
Umur :		
31 – 40 Tahun	19	60,00%
41 – 50 Tahun	7	21,80%
51 – 60 Tahun	6	18,20%
Total :	32	100%
Jenis Kelamin :		
Pria	18	56,20%
Wanita	14	43,80%
Total :	32	100%
Pendidikan Terakhir :		
SMA	0	0%
D	2	06,26%
S1	23	71,87%
S2	7	21,87%
S3	0	0%
Total :	32	100%
Masa Kerja :		
5 – 10 Tahun	14	43,75%
10 – 20 Tahun	6	18,75%
> 20 Tahun	12	37,50%
Total :	32	100%

d. Data Variabel

Data variabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel *Personal Backgroud*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel independen, sedangkan Peran Auditor Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

1) Variabel Dependen Peran Auditor Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pada variabel dependen yaitu peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah dilakukan indikator pertanyaan kepada 32 keusioner adapun pertanyaan dan jawaban responden tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Jawaban Kuesioner Variabel Y

Pertanyaan	Opsii Jawaban									
	SS		S		TT		TS		STS	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Bapak / Ibu harus aktif memantau Implementasi / pelaksanaan APBD.	8	12,3%	20	30,8%	4	6,2%	-	-	-	-
Bapak /Ibu harus aktif mencari tahu isu dalam masyarakat mengenai implementasi / pelaksanaan APBD.	11	16,9%	16	24,6%	5	7,7%	-	-	-	-
Bapak / Ibu aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan yang dibuat eksekutif.	13	20,00%	17	26,2%	1	1,5%	1	1,5%	-	-
Bapak / Ibu harus selalu aktif dalam melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan / bulanan yang SKPD.	3	4,6%	16	24,6%	13	20,00%	-	-	-	-
Bapak / Ibu aktif meminta keterangan atas APBD yang dijalankan.	15	23,1%	15	23,1%	2	3,1%	-	-	-	-
Dalam mengevaluasi laporan pelaksanaan / implementasi APBD. Bapak / Ibu aktif melakukan pengkajian terhadap peralatan, sarana, dan prasarana.	15	23,1%	14	21,5%	2	3,1%	1	1,5%	-	-
Dalam tahap pelaksanaan / implementasi Bapak / Ibu aktif melakukan kajian atas kemampaun pelaksanaan APBD.	10	15,4%	17	26,2%	5	7,7%	-	-	-	-
Dalam tahap pelaksanaan / implementasi APBD Bapak / Ibu aktif melakukan kajian atas	9	13,8%	19	29,2%	4	6,2%	-	-	-	-

disiplin skedul kerja.										
Bapak / Ibu aktif melakukan inspeksi ke lapangan untuk melakukan <i>cross check</i> terhadap laporan yang dibuat oleh eksekutif.	10	15,4%	19	29,2%	2	3,1%	1	1,5%	-	-
Bapak / Ibu melakukan revidi atas laporan keuangan.	14	21,5%	15	23,1%	3	4,6%	-	-	-	-

Dari tabel IV.4 terkait peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan jawaban responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang dengan persentase 12,3%, jawaban setuju 20 orang dengan persentase 30,8%, jawaban tidak tahu sebanyak 4 dengan persentase 6,2. Jawaban responden pada pernyataan kedua menjawab sangat setuju sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 16,9%, jawaban setuju 16 orang dengan persentase sebesar 24,6%, jawaban tidak tahu sebanyak 5 orang dengan persentase 7,7%. Jawaban responden pada pernyataan ketiga menjawab sangat setuju sebanyak 13 orang dengan persentase 20,00%, jawaban setuju 17 orang dengan persentase 26,2%, jawaban tidak tahu 1 orang dengan persentase 1,5%, jawaban tidak setuju 1 orang dengan persentase 1,5%. Jawaban responden pada pernyataan keempat menjawab sangat setuju 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban setuju 16 orang dengan persentase 24,6%, jawaban tidak tahu sebanyak 13 orang dengan persentase 20,00%. Jawaban responden pada pernyataan kelima menjawab sangat setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban tidak tahu sebanyak 2 orang dengan persentase 3,1%. Jawaban responden pada pernyataan keenam menjawab sangat setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban setuju

14 orang dengan persentase 21,5%, jawaban tidak tahu sebanyak 2 orang dengan persentase 3,1%, jawaban responden tidak setuju 1 orang dengan persentase 1,5%. Jawaban responden pada pernyataan ketujuh menjawab sangat setuju 10 orang dengan persentase 15,4%, jawaban setuju 17 orang dengan persentase 26,2%, jawaban tidak tahu sebanyak 5 orang dengan persentase 7,7%. Jawaban responden pada pernyataan kedelapan menjawab sangat setuju 9 orang dengan persentase 13,8%, jawaban setuju 19 orang dengan persentase 29,2%, jawaban tidak tahu sebanyak 4 orang dengan persentase 6,2%. Jawaban responden pada pernyataan kesembilan menjawab sangat setuju 10 orang dengan persentase 15,4%, jawaban setuju 19 orang dengan persentase 29,2%, jawaban tidak tahu sebanyak 2 orang dengan persentase 3,1%, jawaban tidak setuju 1 orang dengan persentase 1,5%. Jawaban responden pada pernyataan kesepuluh menjawab sangat setuju 14 orang dengan persentase 21,5%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban tidak tahu sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%.

2) Variabel *Personal Background*

Pada variabel independen *personal background*, dilakukan dengan delapan (8) indikator pertanyaan kepada 32 responden adapun pertanyaan dan jawaban responden sebagai berikut :

Tabel IV.5
Jawaban Kuesioner Variabel X.1

Pertanyaan	Opsis Jawaban									
	SS		S		TT		TS		STS	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Jenjang pendidikan Bapak / Ibu mendudkung dalam melaksanakan	5	7,7%	14	21,5%	6	9,2%	6	9,2%	-	-

tugas.										
Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dapat membantu melaksanakan tugas sebagai staff inspektorat.	9	13,8%	18	27,7%	5	7,7%	-	-	-	-
Pendidikan Bapak / Ibu Bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu.	5	7,7%	15	23,1%	6	9,2%	6	9,2%	-	-
Pengalaman organisasi Bapak /Ibu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bapak/Ibu saat ini.	5	7,7%	12	18,5%	3	4,6%	12	18,5%	-	-
Pengalaman organisasi Bapak /Ibu mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas.	5	7,7%	13	20,00%	6	9,2%	8	12,3%	-	-
Semakin lama Bapak / Ibu mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.	13	20,00%	10	15,4%	1	1,5%	8	12,3%	-	-
Pengalaman Kerja di Inspektorat menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas.	3	4,6%	12	18,5%	3	4,6%	14	21,5%	-	-
Masa kerja Bapak / Ibu di Inspektorat memberikan pengalaman	3	4,6%	14	21,5%	7	10,8%	8	12,3%	-	-

dalam pelaksanaan tugas.										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel IV.5 terkait *personal background* dapat dijelaskan jawaban responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 7,7%, jawaban setuju 14 orang dengan persentase 21,5%, jawaban tidak tahu sebanyak 6 dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 6 orang dengan persentase 9,2%. Jawaban responden pada pernyataan kedua menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 13,8%, jawaban setuju 18 orang dengan persentase sebesar 27,7%, jawaban tidak tahu sebanyak 5 orang dengan persentase 7,7%. Jawaban responden pada pernyataan ketiga menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 7,7%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban tidak tahu 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 6 orang dengan persentase 9,2%. Jawaban responden pada pernyataan keempat menjawab sangat setuju 5 orang dengan persentase 7,7%, jawaban setuju 12 orang dengan persentase 18,5%, jawaban tidak tahu sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban tidak setuju 12 orang dengan persentase 18,5%. Jawaban responden pada pernyataan kelima menjawab sangat setuju 5 orang dengan persentase 7,7%, jawaban setuju 13 orang dengan persentase 20,00%, jawaban tidak tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 8 orang dengan setuju 12,3%. Jawaban responden pada pernyataan keenam menjawab sangat setuju 13 orang dengan persentase 20,00%, jawaban setuju 10 orang dengan persentase 15,4%, jawaban tidak tahu sebanyak 1 orang dengan persentase 1,5%, jawaban

responden tidak setuju 8 orang dengan persentase 12,3%. Jawaban responden pada pernyataan ketujuh menjawab sangat setuju 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban setuju 12 orang dengan persentase 18,5%, jawaban tidak tahu sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban tidak setuju Jawaban responden pada pernyataan kedelapan menjawab sangat setuju 9 orang dengan persentase 13,8%, jawaban setuju 19 orang dengan persentase 29,2%, jawaban tidak tahu sebanyak 4 orang dengan persentase 6,2%.

3) Variabel Pengetahuan tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Pada variabel independen pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tiga belas (13) indikator pertanyaan kepada 32 responden adapun pertanyaan dan jawaban responden sebagai berikut :

Tabel IV.6
Jawaban Kuesioner Variabel X.II

Pertanyaan	Opsii Jawaban									
	SS		S		TT		TS		STS	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Bapak / Ibu telah mengikuti berbagai pelatihan tentang keuangan daerah.	8	12,3%	16	24,6%	8	12,3%	-	-	-	-
Sertifikasi dari pelatihan keuangan daerah yang diperoleh Bapak / Ibu dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas.	5	7,7%	16	24,6%	2	3,1%	9	13,8%	-	-
Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan dana tersembunyi.	5	15,4%	14	21,5%	6	9,2%	7	10,8%	-	-
Bapak / Ibu harus mengetahui mengenai rincian APBD.	10	16,9%	8	12,5%	3	4,6%	11	16,9%	-	-
Bapak / Ibu	7	10,8%	12	18,5%	6	9,2%	7	10,8%	-	-

mengetahui mengenai dokumen-dokumen (bukti-bukti yang sah) yang harus ada dalam laporan Pertanggungjawaban bendahara.										
Bapak / Ibu mengetahui mengenai pencatatan dalam buku kas umum (BKU) dan kas Pembantu.	8	12,3%	15	23,1%	3	4,6%	6	9,2%	-	-
Bapak / Ibu harus memiliki kemauan dan kemampuan mencari tahu aspirasi/kebutuhan dan atau komplain masyarakat.	3	4,6%	18	27,7%	4	6,2%	7	10,8%	-	-
Bapak / Ibu harus mampu melakukan kajian dan evaluasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.	5	7,7%	12	18,5%	6	9,2%	9	13,8%	-	-
Bapak / Ibu harus mampu melakukan kajian dan evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran.	2	3,1%	15	23,1%	6	9,2%	9	13,8%	-	-
Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran.	4	6,2%	16	24,6%	6	9,2%	6	9,2%	-	-
Bapak / Ibu mengetahui mengenai dokumen-dokumen (bukti-bukti yang sah) yang harus ada dalam kontrak.	12	18,5%	15	23,1%	3	4,6%	2	3,1%	-	-
Bapak / Ibu dapat	7	10,8%	20	30,8%	3	4,6%	2	3,1%	-	-

mengetahui dan dapat mengidentifikasi jika terjadi kegagalan didalam pelaksanaan kegiatan / proyek pembangunan.										
Bapak / Ibu mengetahui mengenai laporan keuangan konsolidasi.	6	9,2%	18	27,7%	7	10,8%	1	1,5%	-	-

Dari tabel IV.6 terkait peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan jawaban responden pada pernyataan pertama menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang dengan persentase 12,3%, jawaban setuju 16 orang dengan persentase 24,6%, jawaban tidak tahu sebanyak 8 dengan persentase 12,3%. Jawaban responden pada pernyataan kedua menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 7,7%, jawaban setuju 16 orang dengan persentase sebesar 24,6%, jawaban tidak tahu sebanyak 2 orang dengan persentase 3,1%, jawaban tidak setuju sebanyak 9 orang dengan persentase 13,8 %. Jawaban responden pada pernyataan ketiga menjawab sangat setuju sebanyak 5 orang dengan persentase 7,7%, jawaban setuju 14 orang dengan persentase 21,5%, jawaban tidak tahu 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 7 orang dengan persentase 10,8%. Jawaban responden pada pernyataan keempat menjawab sangat setuju 10 orang dengan persentase 15,4%, jawaban setuju 8 orang dengan persentase 12,3%, jawaban tidak tahu sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban tidak setuju 11 orang dengan persentase 16,9%. Jawaban responden pada pernyataan kelima menjawab sangat setuju 7 orang

dengan persentase 10,8%, jawaban setuju 12 orang dengan persentase 18,5%, jawaban tidak tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 7 orang dengan setuju 10,8%. Jawaban responden pada pernyataan keenam menjawab sangat setuju 8 orang dengan persentase 12,3%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban tidak tahu sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban responden tidak setuju 6 orang dengan persentase 9,2%. Jawaban responden pada pernyataan ketujuh menjawab sangat setuju 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban setuju 18 orang dengan persentase 27,7%, jawaban tidak tahu sebanyak 4 orang dengan persentase 6,2%, jawaban tidak setuju 7 dengan persentase 10,8%. Jawaban responden pada pernyataan kedelapan menjawab sangat setuju 5 orang dengan persentase 7,7%, jawaban setuju 12 orang dengan persentase 18,5%, jawaban tidak tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 9 orang dengan persentase sebanyak 13,8%. %. Jawaban responden pada pernyataan kesembilan menjawab sangat setuju 2 orang dengan persentase 3,1%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban tidak tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 9 orang dengan persentase sebanyak 13,8%. %. Jawaban responden pada pernyataan kesepuluh menjawab sangat setuju 4 orang dengan persentase 6,2%, jawaban setuju 16 orang dengan persentase 24,6%, jawaban tidak tahu sebanyak 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban tidak setuju 6 orang dengan persentase sebanyak 9,2%. %. Jawaban responden pada pernyataan kesebelas menjawab sangat setuju 12 orang dengan persentase 18,5%, jawaban setuju 15 orang dengan persentase 23,1%, jawaban tidak tahu

sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban tidak setuju 2 orang dengan persentase sebanyak 3,1%. %. Jawaban responden pada pernyataan kedua belas menjawab sangat setuju 7 orang dengan persentase 10,8%, jawaban setuju 20 orang dengan persentase 30,8%, jawaban tidak tahu sebanyak 3 orang dengan persentase 4,6%, jawaban tidak setuju 2 orang dengan persentase sebanyak 3,1%. %. Jawaban responden pada pernyataan ketiga belas menjawab sangat setuju 6 orang dengan persentase 9,2%, jawaban setuju 18 orang dengan persentase 27,7%, jawaban tidak tahu sebanyak 7 orang dengan persentase 10,8%, jawaban tidak setuju 1 orang dengan persentase sebanyak 1,5%.

2. Hasil Penelitian

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (*Statistical Package For Social Science*) versi 22,0. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan signifikan pengaruh *personal background*, pengetahuan pengelolaan keuangan daerah terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel IV.7
Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,846	6,286		,930	,360
	PB	1,315	,571	,294	2,302	,029
	PTPKD	,511	,104	,630	4,936	,000

a. Dependent Variabel: Y1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS maka diperoleh nilai konstan sebesar 5,846 sedangkan nilai untuk variabel *personal background* (X1) sebesar 1,315, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,511. Sehingga apabila dimasukkan kedalam fungsi asli regresi linear berganda, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 5,846 + 1,315X_1 + 0,511X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) = 5,846 menunjukkan harga konstanta, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sama dengan 23,110.
- b. Koefisien X_1 (b_1) = 1,315, dapat dilihat bahwa nilai t 2,302 dan nilai p -value (0,029) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis didukung, yang artinya variabel *Personal Background* (X_1) berpengaruh positif terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah(Y).
- c. Koefisien X_2 (b_2) = 0,511, dapat dilihat bahwa nilai t 4,936 dan nilai p -value (0,000) < (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis didukung menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(X_2) berpengaruh positif terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari kuesioner diperoleh. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid apabila koefisien korelasi $r_{hitung} > koefisien\ r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ (Ghozali,2013).

Tabel IV.8
Uji Validitas Data *Personal Background*

Korelasi Antara	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Keterangan
Pertanyaan 1 dengan total	0,692	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 2 dengan total	0,390	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 3 dengan total	0,741	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 4 dengan total	0,461	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 5 dengan total	0,645	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 6 dengan total	0,482	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 7 dengan total	0,389	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 8 dengan total	0,718	0,2185	0,00	Valid

Sumber : Lampiran 3

Tabel IV.9
Uji Validitas Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Korelasi Antara	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Keterangan
Pertanyaan 1 dengan total	0,392	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 2 dengan total	0,513	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 3 dengan total	0,378	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 4 dengan total	0,385	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 5 dengan total	0,375	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 6 dengan total	0,574	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 7 dengan total	0,576	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 8 dengan total	0,610	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 9 dengan total	0,579	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 10 dengan total	0,568	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 11 dengan total	0,641	0,2185	0,00	Valid

Pertanyaan 12 dengan total	0,357	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 13 dengan total	0,425	0,2185	0,00	Valid

Sumber : Lampiran 3

Tabel IV.10
Uji Validitas Peran Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Korelasi Antara	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Keterangan
Pertanyaan 1 dengan total	0,667	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 2 dengan total	0,741	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 3 dengan total	0,840	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 4 dengan total	0,452	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 5 dengan total	0,702	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 6 dengan total	0,808	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 7 dengan total	0,796	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 8 dengan total	0,743	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 9 dengan total	0,779	0,2185	0,00	Valid
Pertanyaan 10 dengan total	0,770	0,2185	0,00	Valid

Sumber : Lampiran 3

Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefesioen koefesien korelasi $r_{hitung} >$ koefesien r_{tabel} dengan tingkat signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan dari setiap variabel telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur keandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konflik. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan *cronbach alpha* (α), apabila nilai *cronbach alpha* dari hasil pengujian $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel penelitian adalah reliable (Ghozali, 2013).

Tabel IV.11
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>alpha cronbach</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Peran Auditor Inspektorat Dalam	0,731	0,6	Reliabel

Pengawasan Keuangan Daerah (Y)			
<i>Personal Background</i> (X1)	0,718	0,6	Reliabel
Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0,774	0,6	Reliabel

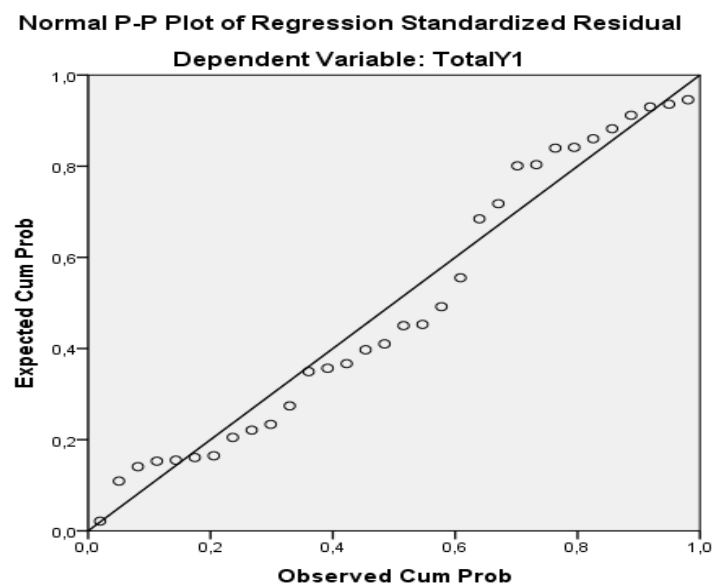
Sumber : Lampiran 4

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* semua variabel lebih besar 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu penelitian memenuhi syarat apabila memiliki normal. Pada penelitian uji normalitas menggunakan uji Normal Probability Plot dan pengujian statistik *Kolmogrov Smirnov*.



Gambar IV.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2019

Dari hasil uji normalitas pada gambar IV.1 dapat diketahui bahwa plot data (sebesar data) mengikuti garis linear. Maka dari itu pengujian dapat dikatakan normal. Untuk mendukung pernyataan ini maka pengujian P-Plot di lengkapi dengan pengujian uji statistik dengan menggunakan uji *kolmogorv smirnov* yang tersaji dibawah ini :

Tabel IV.12
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
		32
	Normal Parameters ^{a,b}	,0000000
	Deviation	3,41611966
Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,078
	Statistic	,616
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,843

a. The underlying normal distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, diperoleh besarnya nilai *kolmogorv smirnov* adalah 0,616 dan signifikan pada 0,843. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013)..

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.

Tabel IV.13
Uji Multikolinearitas

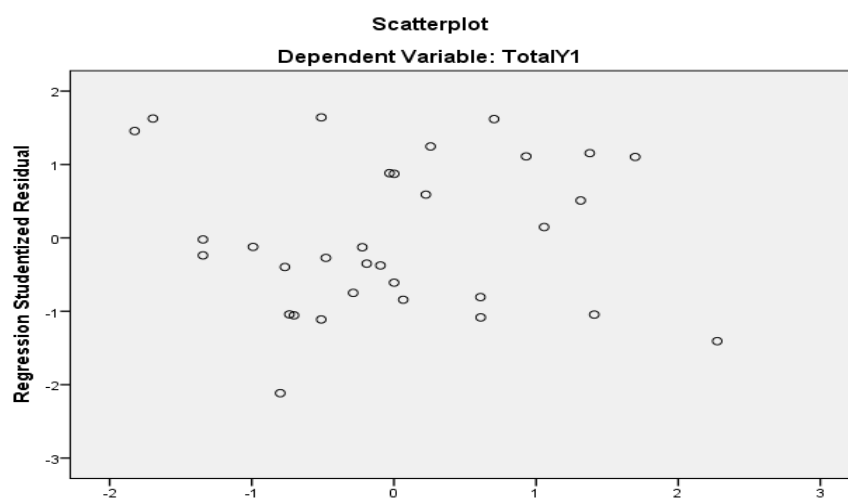
No	Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1.	<i>Personal Background</i>	,959	1,042
2.	Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	,959	1,042

Sumber : Lampiran 5

Dari tabel di atas diketahui hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) memiliki nilai tidak lebih dari 10, begitu juga apabila ditinjau dari nilai *Tolerance* memiliki nilai tidak kurang dari 0,1. Jadi dapat dikatakan bahwa masing-masing dari variabel independen terbebas dari multikolinearitas dalam model regresi.

3) Uji Heterokedastitas

Uji heterokedastitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastitas. Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis garfis plots.



Gambar IV.2 **Uji Heterokedastitas**

Dari gambar IV.2 menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka Nol (0) pada sumbu Y. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas dalam regresi.

c. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. Analisis regresi bermanfaat terutama untuk tujuan peramalan (*estimation*), yaitu bagaimana variabel independen digunakan untuk menestimasi nilai variabel dependen. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, regresi juga digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan.

1) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas (Supranto, 2005:158, Gujarti, 2003:212). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi R^2 yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel tak bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel tak bebas amat terbatas. Nilai koefisien determinasi R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variasi variabel bebas. Berikut ini hasil perhitungan dengan menggunakan *software* SPSS 22.0. untuk mengetahui koefisien determinasi :

Tabel IV.14
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,732 ^a	,536	,504	3.53195

Predictors: (Constant), TotalX2, TotalX1

Dependent Variable: TotalY1

a. R Squared: Lampiran 6

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R adalah 0,732. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi / hubungan antara peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dengan dua variabel independennya adalah kuat (>0.5). nilai *R Square* (Koefisien determinasi) adalah 0,536. Namun, karena jumlah variabel independen lebih dari dua, maka digunakan *Adjusted R Square* yaitu 0,504. Hal ini berarti 50,4% variasi dari peran inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel independen yaitu *personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sisanya (100%-50,4%=49,6%) dijelaskan oleh variabel-variabel.

2) Uji Statistik t (Parsial)

Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji T, hasil pengujian statistik (Uji Parsial), untuk variabel *Personal Background* (X1), Pengetahuan Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Dengan membandingkan kriteria pengujian jika $P Value (Sig) < 0,05$ maka H_0 ditolak sedangkan, $P Value (Sig) > 0,05$ maka H_0 diterima.

Tabel IV.15
Hasil Uji t

	Coefficients ^a				
	Instandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	5,846	6,286		,930	,360
.1	1,315	,571	,294	2,302	,029
2	,511	,140	,630	4,936	,000

a. Dependent Variable: TotalY1

umber : Lampiran 6

Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau *sig*. Dengan nilai tingkat signifikansi, yakni jika nilai 5 % maka nilai koefisien regresi parsial = 0. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Namun jika nilai probabilitas < tingkat signifikan yang digunakan, maka nilai koefisien regresi parsial $\neq 0$. Hal ini berarti pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5 %.

3) Pengaruh *Personal Background* (X1) terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Personal background pada tabel IV.12 dalam kolom *unstandardized coefficients* memiliki nilai B sebesar 1,315, nilai *standard error* 0,571.

Sedangkan dalam kolom *standardized coefficients* memiliki Beta sebesar 0,294. Pada kolom T *personal background* memiliki nilai 2,302 dan tingkat signifikannya adalah 0,029 menunjukkan nilai signifikan $0,029 < 0,005$ dan nilai dari uji $t = 2,302 < \text{nilai } t \text{ kritis } 2,045$. Dengan demikian, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima artinya *personal background* berpengaruh signifikan terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada kabupaten labuhan batu.

4) Pengaruh Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah menunjukkan pada tabel IV.12 pengaruh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam kolom *Unstandardized Coefficients* memiliki nilai B sebesar 0,511, nilai *standard error* 0,104. Sedangkan dalam kolom *Standardized Coefficient* memiliki nilai Beta sebesar 0,630. Pada kolom T pengaruh pengetahuan tentang keuangan daerah memiliki nilai 4,936 dan tingkat signifikannya adalah 0,000. Nilai signifikan $0,000 < 0,005$ dan nilai dari uji $t = 4,936 > \text{nilai } t \text{ kritis } 2,045$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Labuhan Batu.

3) Uji Statistik F

Uji F dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model cocok sebagai penjelas variabel dependen.

Kriteria pengujian jika $P \text{ Value (Sig)} < 0,05$ maka H_0 ditolak sedangkan jika $P \text{ Value (Sig)} > 0,05$ maka H_0 diterima. hasil uji F adalah sebagai berikut :

Tabel IV.16
Uji Statistik F

ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	418,234	2	209,117	16,763	,000 ^b
Residual	361,766	29	12,475		
Total	780,000	31			

Dependent Variable: TotalY1

a. Predictors: (Constant), Totalx2, TotalX1

b. Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel IV.13 diatas jika menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dibandingkan bahwa signifikan $< \alpha$ atau $0,000 < 0,05$. Hasil uji pada tabel IV.13 diketahui bahwa nilai dari uji F $16,763 >$ nilai kritis F $3,33$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,5$. Dalam hal ini H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti *Personal Background*, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Laabuhan Batu.

3. Pembahasan

- a. Hubungan *Personal Background* terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial), diketahui bahwa variabel *Personal Background* memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. . *Personal Background* (X_1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen *Personal Background* mempunyai pengaruh positif terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah, artinya setiap kenaikan *Personal Background* turut meningkatkan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Inspektorat harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan pendidikan dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Maka, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang auditor maka akan semakin baik tingkat kematangan berpikirnya dan tingkat ketepatan dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian tidak mendukung hasil penelitian Sitorus (2009) yang menyatakan bahwa *Personal Background* tidak mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Saragih (2016) yang menyatakan bahwa *Personal Background* mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

b. Hubungan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari hasil pengujian secara individual (parsial) Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan. Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) memiliki

hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah, artinya setiap kenaikan Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turut meningkatkan Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Bagi inspektorat, auditor yang mereka miliki harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian Sitorus (2009) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Dari hasil pengujian secara simultan, diketahui bahwa variabel *Personal Background*, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Personal Background* dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian parsial dari variabel *Personal Background*, nilai probabilitas *Personal Background* lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan nilai koefisien variabel *Personal Background* positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh positif dan signifikan antara *Personal Background* dengan variabel Peran Auditor Insektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah secara statistik.
2. Hasil pengujian parsial dari variabel Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, nilai probabilitas Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lebih kecil dari tingkat signifikansi, dan koefisien variabel Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai positif, maka disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan variabel Peran Auditor Insektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah secara statistik.
3. Berdasarkan hasil pengujian $F_{hitung} > F_{tabel}$ (bersama-sama), nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Personal Background* dan Pengetahuan

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

B. Keterbatasan

1. Nilai $R^2 = 0,536$, namun karena jumlah variabel independen lebih dari 2 maka digunakan *Adjust R Square* maka ($100\% - 50,4\% = 49,6\%$) nilai R^2 dapat dikatakan rendah.
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhan Batu sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas.
3. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap secara nyata sehingga penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dan dikembangkan dengan menggunakan model penelitian yang berbeda.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada , peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya untuk meningkatkan R^2 bisa melakukan penambahan variabel independen yang mempengaruhi Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Hasil penelitian Penelitian selanjutnya dapat memperluas area survey atau diluar Kabupaten Labuhan Batu. Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu agar lebih meningkatkan mengenai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan memiliki *personal background* yang baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan para Auditor dalam Pengawasan keuangan Daerah.
3. Hasil penelitian ini sebaiknya minimal dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang , untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Dengan mempertimbangkan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, 2012 *Auditing Buku I*, Jakarta : Salemba Empat.
- Agoes Sukrisno, 2013 *Auditing Buku II*, Jakarta : Salemba Empat.
- Amalia, Fitri. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)”. Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2018. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Beritasumut.com(2017) Plt Kadis Dinkes Kesehatan LabuhanBatu Kena OTT, Para ASN Ketakutan (<https://beritasumut.com/peristiwa/Plt-Kadis-Dinkes-Kesahatan-LauhanBatu-Kena-OTT-Para-Asn-Ketakutan>) diakses pada 8 Januari 2019)
- Budiono, Tania. 2014. Keterbatasan *Financial Attitude, Financial Behaviour & Financial Knowledge* pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Conner, K.R dan Prahalad, C.K (1996). *A Resources-Based Theory Of The Firm : Knowledge Versus Opportunism*. Organization Science, 7 (5), 477501.
- C, Trihendradi.2013. *Step by Step SPSS 22,0 Analisis Statistik*, Yogyakarta : CV Andi
- Dewi, Mustika. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD):. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi Uneversitas Diponegoro Semarang.
- Detiknews.com(2017) KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Bupati LabuhanBatu (<https://news.detik.com/berita/4249339/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-suap-labuhan-bupati-labuhanbatu>).
- Domai, Tjahjanulin. Reinventing Keuangan Daerah (studi tentang pengelolaan keuangan daerah). Di web <http://docs.google.com/lik.brawijaya.ac.id>(2002).
- Ghozali dan Ikhsan (2006). *Metodologi Penelitian*. Madju. Medan.
- Ghozali dan Imam, 2012, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gosumut.com(2017) Tim Saber Pungli Polda Sumut Ciduk Lurah di LabuhanBatu (<https://www.gosumut.com/berita/baca/2017/10/23/tim-saber-pungli-olda-sumut-ciduk-lurah-di-labuhanbatu>) diakses pada 8 januari 2019).
- Harahap, Sofyan Syafri. 1991. *Auditing Kontemporer*. Penerbit Erlangga. Surabaya.

- Hasibuan. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaka winarna dan Sri Murni (2007). “Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Kerasidenan Surakarta Dana Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)”. *Jural Bisnis Dan Akuntansi* Vol 9, No 2, Agustus 2007.
- Juliandi Azuar, Irfan, Saprihal Manurung, (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Edisi Kedua*, UMSU Press, Medan.
- La Palombara, J. 1974. *Politic With In Nation*. Englewood Cliffs : Prentice – Hall Inc.
- Manurung, Adler H dan Rizky, Luthfi T, 2009. *Succesful Financial Palnner : A Complete Guide*. Jakarta : Grasindo
- Mardiasmo. (2001). *Akuntansnis Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.
- M.D Ulum Ihyaul (2012). *Audit sektor Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mulia Andirfa dan Sri Wahyuni (2018). “Pengaruh *Personal Background* Dan Pengetahuan Auditor Inspektorat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Lhokseumawe)”. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* Volume 4 No 1, Februari 2018.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Badan Pemeriksa Keuangan Negara. 2007. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 20 Tahun 2001, tentang *Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah, No 05 Tahun 2004, *tentang Pemebentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Putu, A., Musmini, Lucy., dan Sujana. 2014. “Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah, *personal background*, komitmen, dan kemampuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan:”. *Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* Vol 2 No. 1.
- Rimbano, Dheo. 2016. “Pengaruh kompetensi keuangan auditor (*personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah srta proses pelaksanaan audit internal) terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Musi Rawas”. *Jurnal Adminika* Vol 2 No.1.

- Rumengan, Jemmy, (2013). *Metodologi Penelitian*. Cita Pustaka Media Peritis. Medan.
- Saragih, Dita Amanda. 2016. “Pengaruh Personal Background, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengalaman Auditor, akuntabilitas, dan Independensi terhadap Kualitas Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sitorus, Andi Haposan. 2009. “Pengaruh *Personal Background* Dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, Studi Kasus Inspektorat Dalam Pemerintah Kabupaten Langkat.” Skripsi, USU, Medan.
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin & Werry, 2002:23) Indikator Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Pelita* Vol.XI No.2
- Undang-Undang Republik Indonesia , Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksaan Keuangan*.
-
- _____, Nomor 25 Tahun 1990 juncto (jo).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
-
- _____, Nomor 25 Tahun 1999 juncto (jo).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Widayati, Irin. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Literasi Finansial* Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol.1 Madiun. IKIP PGRI Madiun.
- Winanrna, Murni 2007. “Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah’. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Semarang*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 313/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/11/2018

Nama Mahasiswa : PUTRI NOVITA MUNTHE
NPM : 1505170670
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PEMERIKSAAN
Tanggal Peugajuan Judul : 19/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 1. (satu) atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : M. Fahmi SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Pengaruh Permodalan Background dan Pengaruh Permodalan terhadap Perilaku Keuangan Rumah Tangga (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
M. Fahmi SE, M.Si (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)
dalam pengajaran Kewirausahaan di Feb. bel. batu.

Medan, 3 Desember 2018

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(M. Fahmi SE, M.Si.)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

P	U	T	R	I		N	O	V	I	T	A		M	U	N	T	H	E	
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	6	7	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

T	A	N	J	U	N	G		B	A	L	A	I							
1	4		N	O	V	E	M	B	E	R		1	9	9	2				

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	a	l	a	n		A	L	F	A	L	A	A	H	-	4					
J	a	l	a	n		P	a	d	a	n	g		m	a	t	r	a	n	g	g

Tempat Penelitian :

I	N	S	P	E	K	T	O	R	A	T		K	A	B	U	P	A	T	E	N
L	A	B	U	H	A	M		B	A	T	U									

Alamat Penelitian :

J	i		S	i	s	i	n	g	a	m	a	n	g	a	r	a				
N	O		6	2		R	a	n	t	a	u		P	r	a	p	a	e		

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, Fe, MSi)

Wassalam
Pemohon

(PUTRI NOVITA MUNTJE)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : PUTRI NOVITA MUNTHE
NPM : 1505170670
PROGAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI AUDIT
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND* DAN
PENEGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERAN
AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN
KEUNANGAN DAERAH.

Tanggal	Materi Bimbingan Laporan	Paraf	Keterangan
29/12-18	Intar belakng Masalah, Teori, Metode Daftar pustaka, Sistematika penulisan.	[Signature]	
5/01-19	Intar belakng Masalah, Rincian Detail Terdahulu, Kumpulan Bureptal. Metode, Kuisoran.	[Signature]	
11/01-19	Pengembangan Hipotesis	[Signature]	
12/01-19	Ace	[Signature]	

Dosen Pembimbing
Skripsi

MUHAMMAD FAHMI SE, M.Si

Medan, Januari 2019

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 132/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
 Pada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Putri Novita Munthe**
 N P M : **1505170670**
 Semester : **VII (Tujuh)**
 Program Studi : **Akuntansi**
 Judul Proposal / Skripsi : **Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peran Auditor Dlaam Pengawasan keuangan Daerah Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu**

Dosen Pembimbing : **M. Fahmi, SE., M.Si., Ak.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkanya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 10 Januari 2020**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 04 Jumadil Awwal 1440 H
 10 Januari 2019 M



Dekan ✓

PUTRI NOVITA MUNTHE, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
 JalanSisingamangaraja No. 062. TELP. (0624) 325840 FAX. (0624) 325840
RANTAUPRAPAT

Rantauprapat, 2 Desember 2018

Nomor : 800 / 1050 / Itkab.Sekr / 2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset

Kepada,
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera
 Utara
 di-
 Tempat

Sehubungan dengan surat dari Majelis Pendidikan Tinggi penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 7580/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal izin riset. Dengan ini Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu memberikan izin kepada :

Nama : Putri Novita Munthe
 NPM : 1505170670
 Semester : VII (tujuh)
 Program Studi : Akuntansi

untuk melakukan riset di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu guna untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTOR DAERAH KABUPATEN
 LABUHANBATU



ZAINUDDIN HARAHAP, SH,MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660620 199303 1 005

Tembusan :

Yth. Plt Bupati Labuhanbatu sebagai laporan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 21 Januari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi merangkan bahwa :

N a m a : PUTRI NOVITA MUNTHE
N .P.M. : 1505170670
Tempat / Tgl.Lahir : TANJUNG BALAI, 14 NOVEMBER 1997
Alamat Rumah : JL.PADANG MATINGGI RANTAU
JudulProposal : PENGARUH PERSONAL BACKGROUND,DAN PENGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
I	ibm lebih jelaskan. - rumusan masalah identifikasi masalah.
II	teori ditambahkan
III	waktu penelitian - teknik pengumpulan data. populasi - analisis data. hasil analisis data
nya	Sis. tematica penulisan
mpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing

MUHAMMAD FAHMI,SE,M.Si

Pembanding

SUKMA LESMANA,SE,M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI NOVITA MUNTHE
N .P.M. : 1505170670
Tempat / Tgl.Lahir : TANJUNG BALAI, 14 NOVEMBER 1997
Alamat Rumah : JL.PADANG MATINGGI RANTAU
JudulProposal : PENGARUH PERSONAL BACKGROUND,DAN PENGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU).

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Muhammad Fahmi, SE, M.Si AK 20/1-105

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

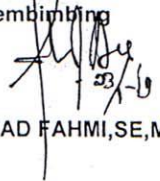
Ketua


FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si

Sekretaris


ZULIA HANUM,SE,M.Si

Pembimbing


MUHAMMAD FAHMI,SE,M.Si

Pembanding


SUKMA LESMANA,SE,M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan
Wakil Dekan I


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : PUTRI NOVITA MUNTHE
N.P.M : 1505170670
Program Studi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PENGARUH PERSONAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERAN AUDITOR INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Papaf	Keterangan
28/2-19	Hasil Penelitian, Keabsahan, Kembali, Saran, Lampiran, Abstrak.		Kembali.
27/3-19	Abstrak, Ristematik penulisan, lampiran		Kembali.
4/3-19	Lampiran, Daftar pustaka.		Kembali.
5/3-19	Ace		

Pembimbing Skripsi

 (MUHAMMAD FAHMI, SE, M.Si, Ak)

Medan, Maret 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



UMSU

|| Cerdas | Terpercaya

b surat ini agar disebutkan
nggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1217 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 28 Jumadil Akhir 1440 H
05 Maret 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu
Jln. SM. Raja No. 62
Rantau Prapat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Putri Novita Munthe
N P M : 1505170670
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan 



H. ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Sisingamangaraja No. 062, TELP. (0624) 325840 - FAX. (0624) 325840
 Email:ltkab_labuhanbatu62@yahoo.com

R A N T A U P R A P A T

SURAT KETERANGAN

No : 800/186 /Itkab.Sekr/2019

yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zainuddin Harahap, SH, MM
 No. : 19660620 199303 1 005
 Tingkat/ Go. Ruang : Pembina Utama Muda/ IV/c
 Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu
 Instansi Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

yang menerangkan bahwa :

Nama : Putri Novita Munthe
 No. : 1505170670
 Semester : VII (tujuh)
 Program Studi : Akuntansi

yang bersangkutan telah melaksanakan riset di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan Judul Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Tentang Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
 LABUHANBATU
 SEKRETARIS



MUHAMMAD RABIUL AMIN, Sos, MM
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19740514 199401 1 001

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI NOVITA MUNTHE

NPM : 1505170670

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



PUTRI NOVITA MUNTHE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **PUTRI NOVITA MUNTHE**
Tempat / Tgl lahir : Tanjung Balai, 14 November 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Padang Matinggi Kampung Bangunan. Rantau
Prapat
Ayah : Awaluddin Munthe, S.H
Ibu : Hj. Mesra Pohan, S.E
Pendidikan :

1. Tahun 2003 – 2009 SD 132407 Tanjung Balai
2. Tahun 2009 – 2012 SMP Negeri 3 Rantau Utara
3. Tahun 2012– 2015 SMA Negeri 1 Rantau Utara
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Maret 2019


PUTRI NOVITA MUNTHE